

R I S A L A H

RAPAT PENYAMPAIAN PENGANTAR NOTA KEUANGAN RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020
DAN PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

JENIS RAPAT : RAPAT PARIPURNA

HARI / TANGGAL : JUMAT / 25 JUNI 2020

WAKTU : 08.30 WIB s.d selesai

ACARA : RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN PENGANTAR NOTA KEUANGAN
RAPERDA RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN PENYAMPAIAN
PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP
RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN RAPAT : WAKIL KETUA DPRD KOTA SALATIGA
BPK. LATIF NAHARI, ST

HADIR : 18 ORANG ANGGOTA DPRD, TERDIRI:
12 ORANG HADIR DI RUANGAN
6 ORANG VIA ZOOM MEETING
DAN 25 ORANG OPD PEMERINTAH KOTA
SALATIGA DAN TAMU UNDANGAN, TERDIRI:
17 ORANG HADIR DI RUANGAN
8 ORANG VIA ZOOM MEETING

HASIL

RAPAT PENYAMPAIAN PENGANTAR NOTA KEUANGAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 DAN PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

A. PELAKSANAAN

HARI : JUMAT
TANGGAL : 25 JUNI 2020
WAKTU : PUKUL 08.30 WIB
HADIR : 18 ORANG ANGGOTA DPRD DAN 25 ORANG OPD
PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAN TAMU UNDANGAN

Anggota DPRD yang hadir

➤ Di ruangan :

1.	Latif Nahari, ST	Wakil Ketua
2.	Saiful Mashud	Wakil Ketua
3.	Hj. Rlawan Woro E	Anggota
4.	M Miftah	Anggota
5.	Sarmin	Anggota
6.	Nono Rohana	Anggota
7.	Agus Joko Setiawan	Anggota
8.	Listiyanto	Anggota
9.	Fatoni	Anggota
10.	Bagas Aryanto	Anggota
11.	Agus Pramono	Anggota
12.	Novia Praptiningsih	Anggota

➤ Hadir Via Zoom

1.	Dance Ishak Palit, M.Si	Ketua
2.	Aslinda Afiyanti	Anggota
3.	Bonar Novi Priatmoko, SH	Anggota
4.	Budi Santoso	Anggota
5.	Basirln	Anggota
6.	Yusuf Wibisono	Anggota
7.	Sarwono	Anggota

➤ Undangan yang hadir

➤ Hadir di Ruangan

1.	Bapak Muh Haris	Wakil Wali Kota Salatiga
2.	Ibu Wuri	Sekretaris Daerah
3.	Mustaln	Asisten II Sekda
4.	Bp. Slamet Setyo Budi	Inspektur Kota Salatiga
5.	Suhestiwening	Kepala BPKPD
6.	Agus R	BPKPD

➤ Hadir Via Zoom

1. Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
2. Kepala Bappeda Kota Salatiga
3. Kepala Dinas PUPR Kota Salatiga
4. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga
5. Kepala Dinas Perdagangan Kota Salatiga
6. Direktur RSUD Kota Salatiga

7. Kepala Bagian Hukum Kota Salatiga
8. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

A. JALANNYA RAPAT

➤ Bpk. Latif Nahari, ST

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Yang kami hormati Bapak Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD kota Salatiga

Yang kami hormati Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga

Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf ahli walikota dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dan yang kami hormati tamu undangan dan hadirin yang berbahagia

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala di tengah pandemi covid 19 yang semakin melonjak kasusnya di Kota Salatiga kita semua masih bisa bersama-sama menghadiri rapat paripurna ini walaupun ada yang hadir secara fisik dan juga kita minta sebagian untuk menghadiri secara online melalui zoom meeting karena kondisi yang tidak memungkinkan rapat paripurna kita pada kesempatan pagi hari ini kita laksanakan dengan protokol kesehatan hadir bersama kita secara daring Ketua DPRD kota Salatiga Bapak Dance Ishak Palit, M.Si

Selamat pagi Ketua siap bersama-sama kita melalui Zoom meeting yang sekarang Beliau sedang isolasi Mandiri karena covid-19, kami secara pribadi dan juga atas nama lembaga DPRD menyampaikan semoga beliau segera pulih kembali

Yang kami hormati hadir juga di tengah-tengah kita walaupun juga secara daring Bapak Wali Kota Salatiga Selamat pagi Bapak Yulianto, SE.MM dan juga segera pulih kembali walaupun sudah sehat tapi mudah-mudahan segera bisa beraktifitas seperti sedia kala. Bapak, Ibu yang kami hormati Sebelum kita mulai rapat paripurna mohon perkenan Bapak Ketua DPRD untuk memberikan sambutan atau arahan atau mungkin menyapa kepada kita semua, Ketua DPRD kami persilahkan.

➤ Bpk. Dance Ishak Palit, M.Si

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Shalom salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua

Saya menyapa dari rumah karena kondisi saya dan keluarga sedang isolasi mandiri

Tetapi tetap melaksanakan tugas, kondisi saat ini pandemi covid 19 sudah sangat masif dan siapapun dapat tertular tapi kegiatan-kegiatan sesuai dengan tupoksi kita harus segera kita laksanakan selamat untuk rekan-rekan sekalian yang dapat menjalankan tugas dengan baik dan dalam kegiatan penyampaian nota keuangan pertanggungjawaban APBD 2020, saya menyerahkan kepada wakil ketua untuk memimpin rapat paripurna penyampaian nota keuangan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020 dan penyampaian pandangan umum fraksi, semoga kita semua tetap sehat dan jaga protokol kesehatan. Jadi kita mulai membudayakan yang namanya budaya tegur jadi siapapun bisa untuk menegur orang lain siapa pun tidak tunggu aparat keamanan untuk

menegur apabila kita berhadapan dengan orang yang tidak pakai masker kerumunan atau tidak cuci tangan. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam tetap semangat

➤ **Bpk. Latif Nahari, ST**

Baik Ketua, Bapak/ibu yang kami hormati demikian tadi Bapak ketua DPRD sudah menyapa kita dan kita doakan bersama-sama tentunya ketua DPRD juga teman-teman ASN yang isolasi mandiri juga masyarakat kita semuanya warga Kota Salatiga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan Allahumma Amin

Bapak ibu hadirin yang kami hormati rapat paripurna kita hari ini adalah dalam rangka penyampaian pengantar nota keuangan Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2020 dan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Salatiga Tahun Anggaran 2020

Sebelum acara rapat paripurna pagi hari ini kita mulai agar dapat berjalan lancar tertib dan berkah marilah kita berdoa, berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilahkan terima kasih.

Menurut laporan Plt. Sekretaris DPRD bahwa dari 25 anggota DPRD yang menandatangani dan hadir secara fisik sejumlah 11 orang dan yang daring sekitar 7 orang sesuai peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Salatiga, Rapat Paripurna telah memenuhi kuorum maka rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga pada hari ini Jumat, 25 Juni tahun 2021 saya nyatakan resmi dibuka dan terbuka untuk umum

Bapak ibu hadirin yang kami hormati perlu saya informasikan bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 194 dan 197 bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 bulan Tahun Anggaran berakhir. Baiklah untuk mempersingkat waktu selanjutnya kepada Saudara Walikota Salatiga untuk menyampaikan pengantar nota keuangan Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Salatiga Tahun Anggaran 2020 waktu dan tempat dipersilahkan

➤ **Bpk. Yuliyanto, SE. MM**

Terima kasih Pak Pak Latif

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Shalom, Berkah Dalem,

Namo Buddaya, Om SwastiAstu,

Salam Kebajikan,

Crir Astu Swasti Prajabyah.

Yth. Wakil Walikota Salatiga;

Ykh. Ketua dan Wakil Ketua DPRD;

Ykh. Segenap Jajaran Forkopimda beserta Sekretaris Daerah;
Ykh. Segenap Anggota DPRD;
Ykh. Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Walikota;
Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah; beserta
Ykh. Tamu Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir dalam "Rapat Paripurna Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2020", dalam keadaan sehat wal'afiat.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Perlu saya sampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2020 terdiri atas 7 jenis laporan, dan telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah selama 37 hari kerja, sejak tanggal 20 Januari 2021 dan berakhir tanggal 25 Februari 2021. Dilanjutkan pemeriksaan terinci selama 53 hari kerja sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021. Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2020 telah diserahkan

kepada Pemerintah Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021 dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang merupakan raihan untuk ke-lima kalinya. Saya berkeyakinan bahwa dengan kerja keras disertai dukungan seluruh jajaran pimpinan, staf, dan berbagai pihak, Insya Allah pada tahun-tahun mendatang, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga akan dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kota Salatiga Tahun 2020 terdiri atas:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
- Laporan Arus Kas (LAK);
- Laporan Operasional (LO);
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- Laporan Neraca; dan
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Yang selanjutnya akan saya sampaikan secara garis besar sebagai berikut:

I. Realisasi Pendapatan Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dianggarkan sebesar Rp885.561.351.000,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus lima Puluh Satu Ribu Rupiah), dapat terealisasi sebesar Rp890.223.683.933,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), lebih target sebesar Rp4.662.332.933,00 (Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) atau terealisasi sebesar 100,53% dari yang dianggarkan.

Beberapa pendapatan yang kurang/tidak mencapai target antara lain:

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; dan
- Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.

Sedangkan pendapatan yang mencapai target antara lain:

- Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam;
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Insentif Daerah; dan
- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah adalah Pendapatan Hibah.

Adapun rincian seluruh pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah atau PAD

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp197.768.282.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), dan terealisasi sebesar Rp219.539.400.332,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), selisih lebih sebesar Rp21.771.118.332,00 (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), atau 111,01% dari target yang

ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari beberapa komponen antara lain :

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak daerah dianggarkan sebesar Rp50.374.983.000,00 (Lima Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah), berhasil terealisasi sebesar Rp54.374.473.089,00 (Lima Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah), melebihi target sebesar Rp3.999.490.089,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah), atau mencapai 107,94%.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp7.418.996.000,00 (Tujuh Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah), berhasil direalisasikan sebesar Rp9.296.946.836,00 (Sembilan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), melebihi target sebesar Rp1.877.950.836,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), atau mencapai 125,31%.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp17.001.114.000,00 (Tujuh Belas Miliar Satu Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah), dapat terealisasi sebesar Rp17.096.550.195,00 (Tujuh Belas Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), selisih lebih sebesar Rp95.436.195,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), atau tercapai 100,56%.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah dari yang dianggarkan sebesar Rp122.973.189.000,00 (Seratus Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dapat terealisasi sebesar Rp138.771.430.212,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah), lebih dari target sebesar Rp15.798.241.212,00 (Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah), atau tercapai sebesar 112,85% dari anggaran yang ditetapkan.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp531.128.861.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah), terealisasi sebesar Rp522.042.585.441,00 (Lima Ratus Dua

Puluh Dua Miliar Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), kurang dari target sebesar Rp9.086.275.559,00 (Sembilan Miliar Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), atau tercapai hanya sebesar 98,29%.

Adapun Transfer Pemerintah Pusat ini terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp26.181.881.000,00 (Dua Puluh Enam Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah), dan terealisasi sebesar Rp24.349.789.024,00 (Dua Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Empat Rupiah), kurang dari target sebesar Rp1.832.091.976,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), atau sebesar 93,00%.

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

Dana Bagi Hasil bukan Pajak dianggarkan sebesar Rp2.168.780.000,00 (Dua Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), dapat terealisasi sebesar Rp2.185.175.973,00 (Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), lebih dari target sebesar Rp.16.395.973,00 (Enam Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), atau hanya mencapai 100,76%.

3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp427.568.712.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), terealisasi sebesar Rp425.080.208.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Miliar Delapan Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah), kurang target sebesar Rp2.488.504.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah), dari yang ditetapkan atau terealisasi 99,42%.

4. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan sebesar Rp75.209.488.000,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah), terealisasi sebesar Rp70.427.412.444,00 (Tujuh Puluh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), kurang target sebesar Rp4.782.075.556,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), atau sebesar 93,64%.

b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian Daerah dianggarkan sebesar Rp67.072.402.000,00 (Enam Puluh Tujuh Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah), dapat terealisasi sebesar Rp68.096.041.000,00 (Enam Puluh Delapan Miliar

Sembilan Puluh Enam Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) atau tercapai 101,53%.

c. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Transfer Pemerintah Lainnya dianggarkan sebesar Rp71.413.306.000,00 (Tujuh Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah), terealisasi sebesar Rp61.027.539.252,00 (Enam Puluh Satu Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), kurang dari target sebesar Rp10.385.766.748,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), atau tercapai sebesar 85,46%. Adapun Transfer Pemerintah Daerah Lainnya terdiri dari:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp63.601.306.000,00 (Enam Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Satu Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah), terealisasi sebesar Rp53.450.784.252,00 (Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), kurang dari target sebesar Rp10.150.521.748,00 (Sepuluh Miliar Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), atau sebesar 84,04%.

2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya yang dianggarkan sebesar Rp7.812.000.000,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Belas Juta Rupiah), terealisasi sebesar Rp7.576.755.000,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), kurang dari target yang ditetapkan sebesar Rp235.245.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), atau hanya tercapai sebesar 96,99%.

3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari :

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah dianggarkan sebesar Rp18.178.500.000,00 (Delapan Belas Miliar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), terealisasi sebesar Rp19.518.117.908,00 (Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah), atau sebesar 107,37%.

b. Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Dana darurat tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya.

c. Pendapatan Dana Lainnya

Pendapatan Dana Lainnya tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya.

II. REALISASI BELANJA DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2020 Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp1.096.019.087.000,00 (Satu Triliun Sembilan Puluh Enam Miliar

Sembilan Belas Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dan terealisasi sebesar Rp944.954.212.904,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah) kurang dari target yang ditetapkan sebesar Rp151.064.874.096,00 (Seratus Lima Puluh Satu Miliar Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 86,22%.

Adapun perincian belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp829.737.599.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dan terealisasi sebesar Rp740.768.469.745,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), kurang dari target sebesar Rp88.969.129.255,00 (Delapan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 89,28%.

Adapun Belanja Operasi ini terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp503.951.992.000,00 (Lima Ratus Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp447.671.356.960,00 (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah), kurang dari target sebesar Rp56.280.635.040,00 (Lima Puluh Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Puluh Rupiah), atau sebesar 88,83%.

b. Belanja Barang dan jasa

Belanja Barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp301.956.526.000,00 (Tiga Ratus Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp271.862.126.785,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), kurang dari target sebesar Rp30.094.399.215,00 (Tiga Puluh Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah), atau sebesar 90,03%.

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya.

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya.

e. Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp19.683.031.000,00 (Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), dan terealisasi sebesar Rp18.602.331.000,00 (Delapan Belas Miliar Enam Ratus Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), kurang dari target

sebesar Rp1.080.700.000,00 (Satu Miliar Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Ribuan Rupiah), atau sebesar 94,51%.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp4.146.050.000,00 (Empat Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribuan Rupiah), terealisasi Rp2.632.655.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribuan Rupiah), kurang dari target sebesar Rp1.513.395.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribuan Rupiah), atau sebesar 63,50%.

2. Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp207.385.265.000,00 (Dua Ratus Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribuan Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp174.131.330.590,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribuan Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah), kurang dari target sebesar Rp33.253.934.410,00 (Tiga puluh Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribuan Empat Ratus Sepuluh Rupiah), atau tercapai sebesar 83,97%.

Perincian dari belanja modal ini adalah sebagai berikut :

a. Belanja Tanah

Belanja Tanah dianggarkan sebesar Rp3.802.260.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribuan Rupiah), dan terealisasi sebesar Rp3.610.880.337,00 (Tiga Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribuan Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), atau sebesar 94,97%

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp86.957.436.000,00 (Delapan Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribuan Rupiah), dan terealisasi sebesar Rp61.715.928.045,00 (Enam Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribuan Empat Puluh Lima Rupiah), selisih kurang dari target yang ditetapkan sebesar Rp25.241.507.955,00 (Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Ribuan Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), atau sebesar 70,97%.

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp50.290.004.000,00 (Lima Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ribuan Rupiah), dan terealisasi sebesar Rp47.553.365.500,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribuan Lima Ratus Rupiah), kurang dari target sebesar Rp2.736.638.500,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribuan Lima Ratus Rupiah), atau sebesar 94,56%.

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp63.611.547.000,00 (Enam Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribuan Rupiah), dapat

direalisasi sebesar Rp59.103.396.512,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Seratus Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah), kurang dari target sebesar Rp. 4.508.150.488,00 (Empat Miliar Lima Ratus Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), atau sebesar 92,91%.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp2.053.977.000,00 (Dua Miliar Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dan terealisasi sebesar Rp1.585.157.696,00 (Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), kurang dari target sebesar Rp468.819.304,00 (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah), atau sebesar 77,18%.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp670.041.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), dan terealisasi sebesar Rp562.602.500,00 (Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), kurang dari target sebesar Rp107.438.500,00 (Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), atau sebesar 83,97%.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp58.238.177.000,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dan terealisasi sebesar Rp29.396.368.605,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah), kurang dari target sebesar Rp28.841.808.395,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), atau sebesar 50,48%.

III. TRANSFER / BANTUAN KEUANGAN LAINNYA

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp658.046.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), dan terealisasi sebesar Rp658.043.964,00 (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), kurang dari target sebesar Rp2.036,00 (Dua Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah) atau tercapai sebesar 99,99%.

IV. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Daerah ini terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pada Tahun Anggaran 2020 penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp219.457.736.000,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), dapat terealisasi sebesar Rp219.471.861.483,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan

Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), lebih dari target sebesar Rp14.125.483,00 (Empat Belas Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), atau sebesar 100,01%.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp9.000.000.000,00 (Sembilan Miliar Rupiah) dapat terealisasi Rp9.000.000.000,00 (Sembilan Miliar Rupiah) atau 100%.

Dengan demikian realisasi pembiayaan netto Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp210.471.861.483,00 (Dua Ratus Sepuluh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), atau 100,01% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp210.457.735.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Rincian Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan

a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu adalah mencapai 100,01% karena dari yang dianggarkan sebesar Rp219.457.736.000,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), sedangkan realisasinya sebesar Rp219.457.736.483,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang semuanya dipergunakan sebagai penerimaan pembiayaan.

b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi.

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah tidak dianggarkan akan tetapi terdapat realisasi sebesar Rp14.125.000,00 (Empat Belas Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

f. Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan Piutang Daerah tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan tidak dianggarkan dan tidak terdapat realisasi.

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp.9.000.000.000,00 (Sembilan Miliar Rupiah) dapat

terrealisasi sebesar Rp9.000.000.000,00 (Sembilan Miliar Rupiah) atau sebesar 100%

c. Pembayaran Pokok Hutang

Pembayaran Pokok Hutang tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi.

d. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian Pinjaman Daerah tidak dianggarkan dan tidak terdapat realisasi.

Dengan demikian dalam Tahun Anggaran 2020 terdapat Sisa lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp155.741.332.512,00 (Seratus Lima Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah)

V. LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Saldo Anggaran Lebih Awal pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp219.457.736.483,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). Sedangkan Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp155.741.332.512,00 (Seratus Lima Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah).

VI. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Dari Laporan Operasional dapat diketahui :

1. Jumlah Pendapatan Operasional - LO pada Tahun 2020 adalah Rp933.469.406.208,05 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah Lima Sen).
2. Jumlah Beban LO pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp937.522.015.034,42 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Belas Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah Empat Puluh Dua Sen).
3. Surplus/defisit dari kegiatan operasi adalah defisit sebesar minus Rp4.052.608.826,37 (Empat Miliar Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen).
4. Surplus/defisit dari kegiatan non operasi pada Tahun 2020 adalah surplus sebesar Rp8.476.438.527,12 (Delapan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Dua Belas Sen).
5. Pos Luar Biasa
Pada Tahun 2020 Pos Luar Biasa adalah sebesar minus Rp5.328.516.574,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah). Sehingga dari beberapa komponen Laporan Operasional tadi dapat diketahui surplus/defisit Laporan Operasional adalah defisit sebesar minus Rp904.686.873,25 (Sembilan Ratus Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Dua Puluh Lima Sen).

VII. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

1. Ekuitas Awal Tahun 2020 sebesar Rp3.053.649.791.275,80 (Tiga Triliun Lima Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan

- Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Sen).
2. Surplus/Defisit-Laporan Operasional adalah defisit sebesar minus Rp904.686.873,25 (Sembilan Ratus Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Dua Puluh Lima Sen).
 3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp34.832.197.840,84 (Tiga Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah Delapan Puluh Empat Sen).
 4. Dengan demikian dari beberapa komponen di atas dapat diketahui Ekuitas Akhir Tahun 2020 sebesar Rp3.087.577.302.243,39 (Tiga Triliun Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah Tiga Puluh Sembilan Sen).

VIII. NERACA DAERAH

1. Aset Lancar
Dalam Tahun 2020 Aset Lancar Pemerintah Kota Salatiga adalah sebesar Rp242.117.887.308,61 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah Enam Puluh Satu Sen).
Pada Tahun 2020 turun sebesar Rp43.259.320.771,90 (Empat Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Sembilan Puluh Sen), atau 15,16%, bila dibanding periode Tahun 2019 sebesar Rp285.377.208.080,51 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Puluh Rupiah Lima Puluh Satu Sen).
2. Investasi Jangka Panjang
Pada Tahun 2020 investasi jangka panjang sebesar Rp140.649.185.762,69 (Seratus Empat Puluh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Enam Puluh Sembilan Sen).
Pada Tahun 2020 naik sebesar Rp12.467.723.842,20 (Dua Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Sen), atau 9,73% apabila di bandingkan Tahun 2019 sebesar Rp128.181.461.920,49 (Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah Empat Puluh Sembilan Sen).
3. Aset Tetap
Aset Tetap Tahun 2020 sebesar Rp2.656.541.260.532,86 (Dua Triliun Enam Ratus Lima Puluh Enam Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Enam Sen).

Pada Tahun 2020 naik sebesar Rp47.657.119.239,76 (Empat Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Tujuh Puluh Enam Sen) atau 1,83% apabila dibandingkan periode Tahun 2019 sebesar Rp2.608.884.141.293,10 (Dua Triliun Enam Ratus Delapan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah Sepuluh Sen).

Hal ini disebabkan adanya mutasi tambah dan mutasi kurang atas aset tetap dan akumulasi penyusutan selama Tahun 2020. Mutasi tambah berasal dari realisasi Belanja Modal Tahun 2020 yang memenuhi kriteria sebagai aset, juga berasal dari mutasi SKPD masuk, reklasifikasi dari aset lain kemitraan, hibah masuk dan penilaian harga perolehan. Sedangkan mutasi pengurangan merupakan mutasi SKPD keluar, penghapusan dan koreksi penilaian harga perolehan.

4. Dana Cadangan

Dana Cadangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2020 sama dengan Tahun 2019 adalah sebesar nol rupiah.

5. Aset Lainnya

Pada Tahun 2020, Aset Lainnya adalah sebesar Rp83.389.095.072,61 (Delapan Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah Enam Puluh Satu Sen), naik sebesar Rp33.676.221.750,12 (Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah Dua Belas Sen) atau sebesar 67,74 % apabila di bandingkan Tahun 2019 sebesar Rp49.712.873.322,49 (Empat Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Empat Puluh Sembilan Sen).

Penambahan Aset Tak Berwujud dari adanya belanja modal, belanja barang dan jasa dan reklas dari KIB lain.

6. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp35.120.126.433,38 (Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Dua Puluh Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Tiga Puluh Delapan Sen) atau mengalami kenaikan sebesar Rp16.614.233.092,59 (Enam Belas Miliar Enam Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah Lima Puluh Sembilan Sen), atau sebesar 89,78% apabila dibandingkan periode Tahun 2019 sebesar Rp18.505.893.340,79 (Delapan Belas Miliar Lima Ratus Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah Tujuh Puluh Sembilan Sen).

7. Kewajiban Jangka Panjang

Pemerintah Kota Salatiga per 31 Desember 2020 tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.

8. Kewajiban Kontingensi

Kewajiban kontingensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan

terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah. Kewajiban kontingensi Pemerintah Kota Salatiga terdiri atas tiga perkara hukum perdata yang sedang dihadapi Pemerintah Kota Salatiga dan PD BPR Bank Salatiga, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Salatiga dengan total kerugian material berupa pokok dan bunga yang belum dibayar sebesar Rp1.605.850.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

9. Ekuitas

Jumlah Ekuitas Tahun 2020 adalah sebesar Rp3.087.577.302.243,39 (Tiga Triliun Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah Tiga Puluh Sembilan Sen), mengalami kenaikan sebesar Rp33.927.510.967,59 (Tiga Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Lima Puluh Sembilan Sen) atau 1,11% apabila dibandingkan periode Tahun 2019 sebesar Rp3.053.649.791.275,80 (Tiga Triliun Lima Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Sen).

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat dan Hadirin yang berbahagia,

Demikian penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rencana Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2020 dalam garis besar, adapun penjelasan secara rinci dapat dibahas dalam rapat-rapat pembahasan.

Selanjutnya akan saya serahkan materi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Salatiga Tahun 2020, teriring harapan untuk dapat segera dibahas dan disetujui guna ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Mengakhiri sambutan ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga, atas sinergi yang telah terpelihara dengan baik. Juga kepada segenap Hadirin atas perhatiannya selama mengikuti Rapat Paripurna pada hari ini. Semoga sinergitas yang telah terpelihara tersebut dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang diamanatkan kepada kita, dalam membangun Kota Salatiga. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan kekuatan kepada kita sekalian. Aamiin. Sekian, terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis materi Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Kepada yang terhormat Wakil Wali Kota Salatiga segenap pimpinan DPRD Salatiga untuk maju ke depan

Hadirin dimohon untuk berdiri

Penyerahan oleh Wakil Wali Kota Salatiga kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

Penyerahan selesai Hadirin Dimohon untuk duduk kembali

➤ **Bpk Latif Nahari, ST**

Bapak/ibu hadirin yang kami hormati acara selanjutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Salatiga tahun anggaran 2020 yang pertama kami mohonkan kepada juru bicara Fraksi Demokrat Golongan Karya

➤ **Bpk. Listiyanto**

Assalamu'alaikum
wr.wb.Shaloom... ,
Salam Sejahtera Untuk Kita
Semua.Om swasti astu..
Namo
budaya...
Salam
kebajikan.

- Yang terhormat Walikota dan Wakil Walikota Salatiga,
- Yang kami hormati Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga
- Yang kami hormati Segenap anggota DPRD Kota Salatiga
- Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Salatiga
- Yang kami hormati Segenap Forkopimda Kota Salatiga
- Yang kami hormati Segenap Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
- Yang kami hormati Camat dan Lurah se Kota Salatiga
- Bapak, Ibu Tamu undangan yang berbahagia.

Mengawali Pandangan Umum Fraksi Demokrat Golongan Karya, marilah kita bersama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya pada hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga dalam rangka : Penyampaian Nota Keuangan Rencana Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2020 oleh Walikota Salatiga serta penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Salatiga terhadap Pelaksanaan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2020.

Bapak, Ibu Hadirin yang kami hormati,
Setelah kami membaca dan mencermati laporan Pelaksanaan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2020, akan kami sampaikan beberapa masukan sebagai berikut :

1. Kami sampaikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Salatiga yang telah melaksanakan Program Kerja yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2020.
Semua ini bisa berjalan sesuai rencana berkat kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Salatiga dan Lembaga DPRD Kota Salatiga beserta semua komponen masyarakat yang ada.
Banyak prestasi yang dimunculkan meskipun masih ada beberapa kekurangan disana-sini.

Kami sampaikan penghargaan pula terhadap perolehan Predikat Opini WTP 5 (lima) kali berturut-turut dari BPK yang mana predikat ini jarang sekali bisa didapatkan oleh Pemerintah Daerah lainnya.

Kami berharap prestasi ini untuk bisa dipertahankan secara konsisten dan jangan menjadikan kesombongan bagi Pemerintah Kota Salatiga.

2. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 890.223.683.933,00 (Delapan ratus sembilan puluh milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) melampaui dari jumlah yang di targetkan.

Adapun beberapa komponen pendapatan daerah yang turun yaitu :

1) Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat

2) Pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi

Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kota Salatiga untuk lebih intensif dalam menjalin komunikasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Jawa Tengah agar bisa mendapatkan bantuan keuangan yang lebih tinggi setiap tahunnya.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 219.539.400.332,00 (Dua ratus sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dari yang ditargetkan sebesar Rp. 197.768.282.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), artinya potensi kenaikan Pendapatan Asli Daerah sangat besar apabila semua potensi yang ada bisa dimaksimalkan pengelolaannya.

Untuk itu kami berharap, Pemerintah Kota Salatiga bisa mengadakan pengkajian kembali terhadap potensi-potensi yang ada di Kota Salatiga ini guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada setiap tahunnya.

3. BELANJA DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2020 realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 944.954.212.904,00 (Sembilan ratus empat puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus empat rupiah), dari yang di anggarkan sebesar Rp. 1.096.019.087.000,00 (Satu trilyun sembilan puluh enam milyar sembilan belas juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) atau hanya terserap kurang lebih 86,22%, kami menilai masih kurang efektif serapan anggaran pada tahun 2020, ini adalah kerugian bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Salatiga.

Hal ini terjadi dikarenakan buruknya perencanaan yang ada di masing-masing OPD.

Untuk itu kedepannya Pemerintah Kota Salatiga benar-benar dapat menyusun perencanaan yang matang, agar semua kegiatan yang direncanakan bisa terealisasi dan menyerap semua anggaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Anggaran Adalah Berdasarkan Kebutuhan Bukan Karena Kepentingan.

4. Sampai pada saat ini pandemi Covid-19 di Kota Salatiga masih belum berakhir, kecenderungan kenaikan kasus semakin tinggi.

Dengan keadaan ini, kami Fraksi Demokrat Golongan Karya mengajak kepada kita semua untuk benar-benar menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah, untuk menekan tingkat penularan wabah Covid-19.

Kami menilai saat ini penanganan wabah Covid-19 di Kota Salatiga masih kurang maksimal, meskipun kami menyadari beberapa keterbatasan baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang ada.

Anggaran Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular di tahun 2020 terealisasi sebesar kurang lebih Rp. 132.954.000,- dirasa tidak cukup. Dalam postur anggaran ini Rasio belanja pegawai, belanja barang dan jasa tidak proposional di saat pandemi.

Oleh karena itu kami meminta kepada Dinas terkait (DKK) agar memperbaiki postur anggaran di masa yang akan datang.

Anggaran penanganan pandemi Covid-19 Kota Salatiga sebesar Rp. 72.471.092.600,00 (tujuh puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) terserap sebesar Rp. 46.664.470.289,00 (Empat puluh enam milyar enam ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau hanya kurang lebih 64,40 %.

Dengan melihat kondisi meningkatnya kasus Covid-19 di Kota Salatiga, kami menilai masih sangat kurang efektif serapan anggaran penanganan pandemi Covid tersebut, kenapakah hal ini bisa terjadi.? Mohon menjadi koreksi.

Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk sangatlah timpang, akibatnya pelayanan medis pada masyarakat terjadi kendala dalam pelayanan ataupun operasionalnya. Sehingga mengakibatkan lamanya mengetahui hasil pemeriksaan swab antigen maupun swab PCR. Hal tersebut bisa menjadi potensi salah satu meningkatnya kasus covid di Kota Salatiga, Oleh karena itu Fraksi Demokrat Golongan Karya mengusulkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Pengadaan tenaga medis kontrak
 - 2) Penambahan pengajuan alokasi tenaga medis jalur PNS
 - 3) Penambahan alat penunjang swab antigen / swab PCR minimal di puskesmas- puskesmas, untuk itu harus ada penambahan anggaran untuk pengadaan alat tersebut.
 - 4) Petugas gugus covid di tingkat kelurahan agar di fasilitasi, baik biaya operasional maupun dipenuhi fasilitas kesehatannya (pemberian vitamin dll)
 - 5) Pemeriksaan swab antigen / gennose lebih diarahkan mendekat kepadamasyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih cepat melakukan deteksi dini.
 - 6) Perlu adanya edukasi kepada masyarakat yang terus menerus tentang covid, dengan bekerja sama antara dinas terkait, kader-kader Posyandu, kader-kader kesehatan dan pamong masyarakat lainnya.
 - 7) Untuk meningkatkan pelayanan, di Puskesmas agar di beri dokter spesialis penyakit dalam.
 - 8) Dan pemerintah perlu melakukan terobosan-terobosan di saat darurat.
- Bapak, Ibu, Hadirin, Rapat Paripurna yang kami hormati,
Demikian Pandangan Umum dari Fraksi Demokrat Golongan Karya yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

➤ **Ibu Riawan Woro Endartiningrum, SE**

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua
Salam Indonesia Raya !!!

Yth Walikota dan Wakil Walikota Kota
Salatiga Yang kami hormati :
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga
ORKOMPINDA Kota Salatiga beserta seluruh
jajarannya

Sekretaris Daerah Kota Salatiga beserta seluruh lingkungan
jajarannya Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Salatiga
beserta seluruh jajarannya Kepala Dinas, Camat, Lurah Se-Kota
Salatiga

Dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga, selalu kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmad dan berkenannya pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2020 dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Dan semoga kita selalu diberikan petunjuk serta bimbingannya. Amiin.

Rapat Paripurna yang berbahagia, Kami dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Salatiga atas Laporan Hasil Pemeriksaan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2020 oleh BPK RI yang telah mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke lima kalinya. Hal ini atas kerja keras yang disertai dengan dukungan seluruh jajaran pimpinan, staf, dan berbagai pihak dengan penuh pengharapan untuk tahun yang akan datang bisa mendapatkan predikat yang sama.

Sehubungan dengan penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2020 maka kami Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga menyampaikan beberapa hal terkait dengan pandangan umum Fraksi yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Transfer / Bantuan Keuangan Lainnya
4. Pembiayaan
5. Laporan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
6. Laporan Operasional (LO)
7. Laporan Perubahan Ekuitas
8. Neraca Daerah

Dalam kesempatan ini Fraksi Gerindra tidak akan mengupas satu persatu secara rinciakan tetapi menyoroiti hal-hal yang dianggap penting atau dalam sekala prioritas urgensi.

I. Pendapatan Daerah :

Pendapatan Daerah dalam tahun anggaran 2020, yang telah dianggarkan sebesar Rp. 885.561.351.000,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Milliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 890.223.683.933,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Milliar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) melebihi dari target yang ditetapkan atau terealisasi 100,53%.

Adapun rincian Pendapatan Daerah meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah

Dianggarkan sebesar Rp. 197.768.282.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Milliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 219.539.400.332,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Milliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) Melebihi target yang dianggarkan dengan realisasi sebesar 111,01%. Adapun untuk Pendapatan Asli Daerah meliputi Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2. Dana Perimbangan

Dianggarkan sebesar Rp. 531.128.861.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Milliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 522.042.585.441,00 (Lima Ratus Dua Puluh Dua Milliar Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 98.29%. Adapun untuk Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Dianggarkan sebesar Rp. 156.664.208.000,00 (Seratus Lima Puluh Enam Milliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 148.641.698.160,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Milliar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) atau sebesar 94.88%. Adapun untuk Lain-Lain Pendapatan yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya.

Setelah kita memperhatikan realisasi pendapatan daerah maka Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2020 untuk reklame masih banyak yang belum dilakukan penetapan dengan tanpa ijin dan tidak dipungut biaya. Oleh karena itu Pemerintah Kota Salatiga dalam hal ini saudara Walikota agar melakukan penetapan dan pemungutan atas pendapatan pajak reklame.
2. Melakukan pendataan kembali secara menyeluruh atas potensi penerimaan pendapatan pajak reklame.
3. Terkait dengan Penagihan Piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) masih rendah karena untuk PBB-P2 mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar 15.63% apabila dibandingkan saldo Tahun Anggaran 2019. Oleh karena itu Pemerintah Kota Salatiga harus melakukan terobosan-terobosan sehingga potensi pendapatan dari PBB-P2 bisa ditingkatkan diantaranya harus dilakukannya perbaikan aplikasi dengan pembuatan sistem informasi manajemen objek pajak yang dilakukan oleh Dinas terkait.
4. Perlu transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan serta penataan aset daerah. Pemanfaatan dan penata usahaan aset tetap harus didukung dengan administrasi yang lengkap dan dilakukan inovasi bagaimana agar aset tersebut bisa diberdayakan sehingga bisa memberikan tambahan Pendapatan Daerah.

5. Masing-masing OPD melakukan inovasi dan terobosan dalam rangka untuk meningkatkan objek pajak.

II. Belanja Daerah

Belanja Daerah dalam tahun anggaran 2020 yang telah dianggarkan sebesar Rp. 1.096.019.087.000,00 (Satu Triliun Sembilan Puluh Enam Milliar Sembilan Belas Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) terserap sebesar Rp. 944.954.212.904,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Milliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah) kurang dari target yang ditetapkan atau hanya terserap 86,22%.

Adapun perincian Belanja Daerah meliputi :

1. Belanja Operasi

Dianggarkan sebesar Rp. 829.737.599.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Milliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan terserap sebesar Rp. 740.768.469.745,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Milliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) Serapan anggaran sebesar 89,28%. Adapun untuk Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal

Dianggarkan sebesar Rp. 207.385.265.000,00 (Dua Ratus Tujuh Milliar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dan terserap sebesar Rp. 174.131.330.590,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Milliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah) Serapan anggaran sebesar 83,97%. Adapun untuk Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap lainnya, dan Belanja Aset Lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Dianggarkan sebesar Rp. 58.238.177.000,00 (Lima Puluh Delapan Milliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan terserap sebesar Rp. 29.396.368.605,00 (Dua Puluh Sembilan Milliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah) Serapan anggaran sebesar 50,48%.

Bahwa untuk realisasi Belanja Daerah setelah kita cermati, maka Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga menyampaikan pandangan umum sebagai berikut:

Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2020 sebagaimana yang telah disampaikan oleh saudara Walikota dan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Salatiga yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020 maka sebagai tindak lanjut implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Salatiga dan berdasarkan ketentuan pasal 96 dan Pasal 100 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan sebagaimana telah diubah sesuai dengan Undang-undang No 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 21 Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, PP No 6 Tahun 2006 dan PERMENDAGRI No 17 Tahun 2007, maka :

1. Rancangan dan implementasi sistem pengawasan internal (SPI) di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga belum dilaksanakan secara memadai dan belum mampu secara efektif menjamin pencapaian tujuan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekretariat Daerah belum menjalankan fungsi dan kewenangannya secara optimal dalam pengendalian atas perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam penggunaan keuangan, sehingga menyebabkan timbul masalah kelebihan pembayaran, kerugian daerah, potensi pemborosan keuangan daerah, potensi kelebihan pembayaran, dan bukti pertanggungjawaban kegiatan yang tidak diyakini kebenarannya.
3. TAPD masih kurang cermat dalam mengevaluasi kesesuaian klasifikasi yang diajukan oleh satuan kerja dan masih banyak kepala satuan kerja tidak cermat dalam menyusun RKA pada satuan kerjanya sehingga terjadi kesalahan penganggaran atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal pada beberapa satuan kerja. Sehingga menyebabkan masalah kelebihan pembayaran, kerugian daerah, potensi pemborosan, potensi kelebihan pembayaran, dan bukti pertanggungjawaban kegiatan yang tidak diyakini kebenarannya.
4. Sekretariat Daerah, DPKPD, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas LH, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, RSUD tidak cermat, lalai dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan di lingkungan kerjanya, sehingga timbul masalah baik kelebihan bayar, kerugian daerah, potensi pemborosan, potensi kelebihan pembayaran, dan bukti pertanggungjawaban kegiatan. Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang tidak boleh hal / permasalahan itu terulang kembali.
5. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial masih mengesampingkan terkait dengan perencanaan, dimana perencanaan harus didukung data-data secara lengkap / validasi secara terkoordinasi sebelum menyusun anggaran. Untuk Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana hasil pemeriksaan BPK-RI masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya proposal permohonan, rencana penggunaan, siapa yang harus diberikan bantuan, dan harus diterbitkan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Apabila hal itu tidak dilakukan, Bantuan Sosial tidak akan tepat sasaran dan penggunaan anggaran yang tidak optimal.

III. Transfer / Bantuan Keuangan Lainnya

Terkait dengan Transfer/Bantuan Keuangan Lainnya ini sudah sangat sempurna, karena terkait dengan belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yaitu telah terealisasi sebesar Rp. 658.043.964,00 (Enam Ratus Lima

Puluh Delapan Juta Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) atau tercapai sebesar 99.99%.

IV. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Daerah ini terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pada Tahun Anggaran 2020 penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 219.457.736.000,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Milliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dapat terealisasi sebesar Rp. 219.471.861.483,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Milliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) lebih dari target sebesar Rp. 14.125.483,00 (Empat Belas Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 100,01%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (Sembilan Milliar Rupiah).

Adapun rincian dari pembiayaan meliputi :

1. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan terdiri dari
 - a. Penggunaan SILPA
 - b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah yang sebelumnya tidak pernah dianggarkan.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Daerah hanya sebatas Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah yaitu Rp. 9.000.000.000,00 (Sembilan Milliar Rupiah) sesuai yang dianggarkan.

Dengan demikian dalam Tahun anggaran 2020 terdapat SILPA Rp. 155.741.332.512,00 (Seratus Lima Puluh Lima Milliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan awal Tahun 2021.

Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga dalam pandangan umum ini menekankan agar dilakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan secara efisien dan dengan berdasarkan asas kemanfaatan yang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Jangan sampai SILPA terlampaui tinggi yang nantinya direncanakan hanya untuk menutup defisit anggaran yang akan datang sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya penggunaan anggaran.

V. Laporan Saldo Anggaran Lebih

VI. Laporan Operasional

VII. Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam hal ini Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga tidak memberikan suatu pandangan hanya sebatas mencermati apa yang telah disampaikan oleh saudara Walikota.

VIII. Neraca Daerah

Untuk aset tetap perlu adanya transparansi dan pendataan yang valid, karena sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK-RI masih ada beberapa aset tetap yang belum dipasang papan nama, sertifikat ganda, tanda batas tanah, dan tertib administrasi. Apabila hal itu tidak dilakukan, potensi penyerobotan aset oleh pihak tertentu bisa terjadi.

Demikian pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2020. Atas perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum,
Wr. Wb. Salam
Indonesia Raya !!!

➤ **Bpk. Fatoni**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita
semua

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kota Salatiga.

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Salatiga.

Yang kami hormati segenap Forkopimda beserta Sekretaris Daerah Kota Salatiga.

Yang kami hormati Sekretaris DPRD Kota Salatiga.

Yang kami hormati Para Pimpinan OPD, para Kepala Perangkat Daerah; beserta Yang kami hormati Tamu Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah robbil 'aalamiin, wassholaatu wassalaamu 'alaa asyroofil anbiyaa-i wal mursaliin, nabiyyinaa wahabiibinaa muhammadin, wa'ala alihi washahbihi aj'ma'in, wa man tabi'ahum bihsanin ilaa yaumiddin, Amma ba'du.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, pada hari ini dalam keadaan sehat wal 'afiat. Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih, kepada Pimpinan Rapat, yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Penyampaian pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Salatiga, dalam forum yang terhormat ini.

Penyampaian pandangan umum, pada dasarnya merupakan tugas dan kewajiban konstitusional juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan, antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai sesama unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah. oleh karenanya kemitraan yang sejajar antara Pemerintah Daerah dan DPRD perlu dibinasecara optimal dalam koridor saling asah dan saling isi dengan fungsi, tugas dan peran kita masing-masing.

Rapat Paripurna, Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen bersama antara pelaksana Pemerintahan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif. Guna mewujudkan seluruh keinginan bersama tersebut, serta untuk melaksanakan program kegiatan tersebut tentunya dalam fungsi Dewan sebagai lembaga Legislasi, Budgeting dan Pengawasan menjadi hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan cita-cita bersama tersebut, sehingga mitra lembaga daerah tersebut dapat berjalan seiring seirama secara wajar dan proporsional.

Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya Fraksi PKB DPRD Kota Salatiga menanggapi Penyampaian pengantar Nota Keuangan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Salatiga yaitu, yang telah disampaikan Saudara Walikota dalam sidang Paripurna DPRD Kota Salatiga. Fraksi PKB DPRD Kota Salatiga mengucapkan

selamat atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke-lima kalinya dengan harapan semoga di tahun-tahun ke depan Kota Salatiga lebih maju dan sejahtera sebagaimana harapan bagi warga masyarakat Kota Salatiga.

Berkaitan Penyampaian pengantar Nota Keuangan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Salatiga tentunya Fraksi PKB yang memiliki salah satu tugas mengawasi jalannya Pemerintah Daerah secara bermartabat dan proporsional, memandang bahwa hal tersebut diatas menjadi sangat penting mendapatkan perhatian kami, hal ini dimaksudkan supaya dalam menjalankan tugas pemerintahan menjadi lebih terkontrol dan terkendali. Namun DPRD sebagai pemangku tugas pengawasan harus dan wajib mencermati hasil pelaksanaan Pemerintahan sebelumnya dengan maksud kedepan bahwa keberhasilan yang telah dicapai untuk tetap dipertahankan, sementara kekurangsempurnaan dapat diperbaiki guna mencapai hasil yang optimal dikemudian hari.

Tanggapan dan catatan-catatan Fraksi PKB semata-mata bukan masalah politis, namun semua ini demi kebaikan kita bersama, sehingga Fraksi PKB tetap konsisten untuk meluangkan waktunya mencermati Penyampaian pengantar Nota Keuangan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Salatiga, disamping kami juga menerima masukan-masukan dari pemerhati dan masyarakat. Kemudian dari rangkuman pendapat-pendapat tersebut kami jadikan sebagai catatan strategis, dengan harapan dikemudian hari pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Pembahasan ini terkorelasi dengan waktu perencanaan, pelaksanaan, anggaran dan pengawasan serta peran dari partisipasi masyarakat dalam menilai hasil kerja kita bersama.

Hadirin sidang paripurna yang terhormat,

Berikut ini catatan-catatan rekomendasi dan masukan yang diberikan Fraksi PKB untuk melengkapi Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Salatiga :

Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap kinerja keuangan pemerintah kota salatiga tahun 2020, Sebagaimana Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan tahun Anggaran 2020 pada pemerintah Kota Salatiga yang bersumber dan APBD Tahun Anggaran 2020, maka sebagai tindak lanjut implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Salatiga, berdasarkan ketentuan pasal 96 dan pasal 100 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ; pasal 21 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 secara umum bahwasannya.

1. Rancangan dan implementasi sistem pengawasan Internal (SPI) dilingkungan pemerintah Kota Salatiga atas laporan keuangan tahun anggran 2020 belum dilaksanakan secara memadai dan belum mampu secara efektif menjamin pencapaian tujuan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
2. Sekretariat Daerah belum menjalankan fungsi dan kewenangan secara optimal dalam pengendalian atas perencanaan, penatausahaan pelaporan dan pengawasan keuangan pemerintah kota salatiga, sehingga menyebabkan timbul masalah kelebihan pembayaran, kerugian daerah, potensi pemborosan keuangan daerah.
3. Sekretariat Daerah, Kepala DPKPD, Kepala Dinas PU dan Tata ruang, Kepala Dinas LH, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pertanian, Direktur RSUD, Lalai dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan di lingkungan

kerjanya, sehingga menyebabkan timbul masalah kelebihan pembayaran, kerugian daerah, potensi pemborosan keuangan daerah.

Maka dari itu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Merekomendasikan,

1. Walikota tidak menetapkan daftar penerima Hibah sebesar Rp. 4.908.834.900(Empat Miliar Sembilan ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh empatribu sembilan ratus rupiah) dan hibah tidak dilengkapi NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Sebesar Rp. 9.431.162.660 (Sembilan miliar empat ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu enam ratusanenam puluh rupiah) Fraksi Partai Kebangkitan bangsa merekomendasikan bahwasannya dalam pelaksanaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga untuk menyusun NPHD dan mengusulkan penerima hibah.
2. Pemanfaatan dan penatausahaan Aset tetap, belum didukung dengan Administrasi yang lengkap serta pengamanan Aset tetap belum dilengkapi dengan pengamanan fisik (belum terpasang Papan Tanda Kepemilikan).
3. Bantuan Kendaraan dari Kementerian tidak disertai Dokumen, dimana Pengamanan administrasi Kendaraan dinas dilakukan, dengan menghimpun, mencatat, menyimpan dan menatausahaan secara tertib dan teratur atas dokumen bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), hal tersebut harus diantisipasi yang mengakibatkan potensi beralihnya kepemilikan kepada pihaklain atas aset kendaraan bermotor yang tidak memiliki BPKB.
4. Dalam bantuan sosial siswa kurang mampu (BSSKM) SD dan SMP Kota Salatiga ada temuan bahwasannya dimana dalam teknisnya tumpang tindih dalam bantuan yang diterima dari pusat dan daerah dimana fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengharapkan Dinas pendidikan harus cermat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BSSKM serta mengharapkan koordinasi dan komunikasi secara masif dengan Pengelola PIP di kementerian pendidikan dan kebudayaan supaya tidak terjadi pemberian bantuan ganda ke siswa kurang mampu.
5. Dalam rangka pembenahan perkuatan, dadn pemantapan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka terwujudnya efektifitas dan efisiensi, dalam hal ini dimana Direktur RSUD Kota Salatiga, Lalai dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan dilingkungan kerjanya sehingga menyebabkan timbul masalah kelebihan pembayaran, Kerugian Daerah, Potensi Pemborosan Keuangan daerah, Potensi kelebihan pembayaran dan bukti pertanggungjawaban kegiatan yang tidak diyakini kebenarannya.
6. Terkait pekerjaan penyusunan Dokumen Izin Air Bawah Tanah dan Perbaikannya di RSUD Salatiga, sesuai Kontrak biaya yang harus dibayarkan oleh CV TA kepada Dinaas ESDM pemerintah Provinsi Jawa Tengah SebesarRp. 117.500.000 (Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Namunhasil Konfirmasi Kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah CV TA Hanya Membayar Sebesar Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Dengan Demikian terdapat

kelebihan Pembayaran kepada CV TA Sebesar 115.100.000 (Seratus Lima Belas Juta Seratus ribu rupiah), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa merekomendasikan Kepada Walikota Salatiga agar Kuasa Pengguna Anggaran Lebih Cermat dalam melaksanakan pengawasan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

7. Pembayaran atas dua pekerjaan yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 298.550.000 (Dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) bahwasannya PPK tidak melakukan verifikasi kembali atas bukti pengajuan dokumen pertanggungjawaban tersebut, atas hal itu maka terdapat pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan.
8. Pengadaan Ruang Instalasi Bedah Sentral tidak memenuhi standart baku mutumikrobiologi dan parameter fisik serta belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp. 580.800.000 (Lima ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu Rupiah) hal tersebut belum dapat memanfaatkan hasil pengadaan,serta kurang cermat dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian kontrak yang menjadi tanggungjawabnya.
9. Dalam hal ini fraksi partai kebangkitan bangsa DPRD kota salatiga merekomendasikan agar management RSUD Salatiga dikelola secara baik dan cermat serta Fraksi PKB mendorong betul-betul RSUD Kota salatiga agar dikelola mandiri dan secara Profesional.
10. Terkait dengan pasar pasar strategis yang menjadi aset daerah agar dikelola secara profesional dan membawa manfaat masyarakat kota salatiga dan meningkatkan kesejahteraan dan dampak meningkatkan PAD kota salatiga. Seperti, Pasar Jetis misalnya, yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak jelas penyelesaian yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah kota salatiga agar segera diselesaikan.

Kemudian walhamdulillah pasar rejosari mulai dibangun semoga bermanfaat. Kemudian pasar raya satu dan dua yang sudah habis masa kontraknya, fraksi PKB berharap dikaji secara cermat agar kedepan berdampak secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan khususnya parapedagang.

Kemudian pasar Ramayana sudah diperpanjang Kontraknya, meminta keberpihakannya Pemerintah Kota Salatiga secara lebih nyata terhadap pasar tradisional bukan hanya memberikan kemudahan dan peluang bagi para investor yang bermodal besar, sementara pasar rakyat pasar tradisional tidak dipikirkan secara baik.

11. Pengelolaan Parkir di Jalan Jendral Sudirman harus dikelola secara baik dan cermat agar tidak terkesan semprawut.
12. Terkait Gedung Olahraga (GOR) Kridanggo harus diselesaikan dan harus adasolusi riil agar Gor yang mangkrak bisa dinikmati oleh masyarakat kota salatigasebagaimana fungsinya.
13. Design Trotoar dijalan Sukowati agar dikelola secara baik, dikarenakan Designyang dibangun tidak sesuai dan mengganggu pengguna pejalan kaki sehingga perlu ada solusi dan ditanggapi bagaimana baiknya trotoar yang baik bagi pengguna pejalan kaki.
14. Kemudian terkait penataan kawasan pedagang kaki lima kota salatiga yang berada di Pulutan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga (Depan Kampus 3 IAIN Salatiga) Agar dikelola secara maksimal bagaimana yang sudah menghabiskan ratusan juta akan tetapi

sampai hari ini masih kosong bahkan sudah dipenuhi rumput dan juga tidak ada aktifitas jual beli sehingga fraksi PKB Mendorong Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Agar ada solusi Konkret dalam mengembangkan dan pengelolaan secara maksimal agar masyarakat bisa merasakan dampak perekonomian dan bisa meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat kota Salatiga.

15. Dalam pengelolaan video tron diharapkan bisa selalu dipantau dikarenakan seringkali video tron yang berada di Perpatan Pasar rejosari (Pasar sapi) seringkali mati dan diharapkan videotron bisa memberikan edukasi serta memberikan income pemasukan untuk meningkatkan PAD Kota Salatiga.

16. Kemudian yang terakhir fraksi PKB DPRD Kota Salatiga Merekomendasikan Agar segera mengadakan E-Retribusi, Agar mengurangi tingkat kebocoran yang tinggi, hingga pendapatan yang kurang maksimal, dengan adanya E-retribusi bisa dipantau secara transparan dan diharapkan PAD Kota Salatiga Bertambah.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Sebelum menutup Pandangan Umum ini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap agar proses pembahasan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Salatiga ini betul-betul dimaksimalkan agar menghasilkan Perda yang benar-benar memenuhi keinginan masyarakat Kota Salatiga.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Penyampaian pengantar Nota Keuangan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Salatiga, ada kurang lebihnya dalam penyampaian Pandangan Umum ini kami mohon maaf, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Semoga Tuhan Memberkati kita Semua

Wallahul Muwafiq Illa

Aqwamitthorik

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

➤ **Bpk. Nono Rohana, S.Ag**

Yth. Walikota dan Wakil Walikota Salatiga;

Ykh. Jajaran Forkompinda Kota Salatiga;

Ykh. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga;

Ykh. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;

Ykh. Plt Sekretaris DPRD Kota Salatiga;

Ykh. Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Walikota;

Ykh. Seluruh Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;

Ykh. Para Hadirin dan Tamu Undangan yang Berbahagia.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Sejahtera untuk kita semua

Ungkapan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat-Nya, sehingga sampai saat ini masih berkesempatan untuk hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Salatiga dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2020. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengapresiasi atas prestasi yang telah diraih yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-lima. Dengan terus memaksimalkan kerja di semua perangkat daerah kami yakin Kota Salatiga akan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun-tahun mendatang.

Mencermati Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga yang sudah disampaikan kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera akan menyampaikan beberapa hal pandangan kami sebagai berikut:

A. Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pendapatan Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 885.561.351.000,00 (Delapan Ratus Delapan puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dan teralisasi sebesar Rp. 890.223.683.933,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah). Kami mengapresiasi bahwa pendapatan daerah melebihi dari target sebesar Rp. 4.662.332.933,00 (Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

Akan tetapi kami dari Fraksi PKS mengusulkan untuk diadakannya studi potensi agar potensi pendapatan daerah dapat terukur dan target yang ditetapkan sesuai dengan hasil studi potensi. Meski Pandemi belum ada tanda-tanda selesai kami tetap meminta Pemerintah Kota dapat mengoptimalkan objek yang sudah ada maupun objek yang baru sehingga pendapatan daerah dapat meningkat. Untuk kedepan, Pemerintah Kota Salatiga tidak hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak, tapi juga harus meningkatkan Pendapatan dari keuntungan atau kontribusi Badan Usaha Milik Daerah maupun badan-badan usaha lainnya.

2. Belanja Daerah

Pada Tahun Anggaran 2020 belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 1.096.019.087.000,- (satu triliun sembilan puluh enam miliar sembilan belas juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) akan tetapi dalam realisasi sebesar Rp. 944.954.212.904,- (sembilan ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus empat rupiah) atau 86,22%.

Dalam realisasi Belanja Daerah selain perencanaan yang baik dan terukur tentunya dalam hal pelaksanaan kegiatan juga harus lebih serius dan dimulai dari awal tahun sehingga cukup waktu dalam pelaksanaan kegiatan maupun program. Anggaran Belanja Daerah harus dilakukan evaluasi seberapa efektif anggaran belanja tersebut dapat melaksanakan prioritas pembangunan pada tahun yang akan datang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, percepatan pengurangan angka kemiskinan dengan kemandirian pangan dan energi.

3. Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Saldo Anggaran Lebih Akhir di tahun 2020 sebesar Rp. 155.741.332.512,- (seratus lima puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah). Kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memaknai dengan 2 (dua) sisi yang berbeda, bisa bermakna positif (efisiensi anggaran) atau negatif (salah perhitungan, salah manajemen, salah program, menaikkan perhitungan anggaran), apabila diklasifikasikan dalam aspek efisiensi, maka ada 3 (tiga) klasifikasi, yaitu:

- 1) Efisiensi dengan wajar, memiliki makna program terlaksana dan terjadi penghematan anggaran karena faktor eksternal (misal turunnya harga atau peraturan);

- 2) Efisiensi dengan tidak wajar, memiliki makna program terlaksana dan terjadi penghematan anggaran karena faktor internal (misal dalam penyusunan anggaran sudah dinaikan sekian persen dari harga/nilai dasar/baku);
- 3) Tidak efisien, memiliki makna program bisa terlaksana atau tidak terlaksana dan tidak terjadi penghematan anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada Walikota Salatiga agar dapat memberikan penjelasan makna Laporan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) Tahun 2020 tersebut, dan mohon selanjutnya dilakukan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan yang menghasilkan sisa anggaran, serta apakah masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan berdasarkan pada rencana strategis dan rencana operasional serta strategi dan target pencapaian yang sinergi dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Rencana Strategi dan rencana operasional institusi Pemerintah Kota Salatiga dan visi kepemimpinan Walikota? Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap Laporan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) Tahun 2020 bermakna positif.

B. Prioritas Kebijakan

Kami Fraksi PKS juga memberikan masukan terkait prioritas kebijakan Walikota sebagai berikut :

1. Kami Fraksi PKS mengapresiasi Dinas Kesehatan terutama para dokter perawat dan pejuang kesehatan lainnya yang saat ini berjabaku dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama dalam mengendalikan penyebaran Covid 19. Perlu adanya payung hukum, jaminan kesejahteraan bagi satgas covid sampai tingkat RT/RW dimana mereka juga berjabaku dalam mendampingi warganya menanggulangi covid-19.
2. Memaksimalkan seluruh rumah sakit yang ada ditambah dengan rumah singgah sebagai rumah isolasi sementara bagi pasien covid 19. RSUD mohon menganggarkan pengadaan alat SWAB PCR untuk mempercepat penanganan covid sehingga bisa mendeteksi sedini mungkin orang yang terindikasi positif Covid-19 serta membuat kebijakan agar biaya test swab mandiri lebih terjangkau.
3. Ditengah pandemi ini juga kami berharap Dinas Pendidikan membuat terobosan baru untuk sekolah sekolah dalam kegiatan belajar mengajar karena dengan sistem daring masih banyak kendala terutama terkait kualitas pendidikan anak didik kita dimasa depan.

4. Dengan semakin merebaknya toko modern yang berdiri di wilayah kota Salatiga, Fraksi PKS meminta kepada Pemerintah Kota Salatiga agar selain menghentikan penambahan toko-toko modern tersebut juga agar Pemerintah Kota bisa menjadikan pasar-pasar tradisional yang ada menjadi lebih berkualitas dalam hal sarana prasarana sehingga bisa bersaing dengan toko modern yang ada.
 5. Beberapa pasar tahun ini mulai dibangun khususnya pasar Rejosari sebagai salah satu pusat roda ekonomi masyarakat kota Salatiga. Diperlukan adanya kebijakan dan rumusan yang tepat terkait retribusi, harga sewa, tata kelola lainnya agar tidak memberatkan pedagang pedagang kedepan.
 6. Pemerataan pembangunan infrastruktur harus diperhatikan, Perbaikan jalan jalan yang berada ditengah kampung walaupun jalan sangat sempit, fasum perumahan yang pengembangnya sudah tidak mengurus lagi juga perlu dibantu terkait regulasi dan diarahkan agar masyarakat merasakan pembangunan yang merata. Termasuk Penerangan Jalan Umum juga harus merata sampai daerah pinggiran.
 7. Memperbanyak titik-titik resapan dan pembuatan drainase yang bisa mengatasi banjir dikarenakan semakin banyak keluhan warga disaat hujan air menggenang di jalan bahkan masuk rumah warga.
 8. Tingginya kesadaran masyarakat dalam olahraga perlu dibuat sarana yang representatif di setiap kelurahan. Beberapa sudah diperbaiki seperti lapangan Kecandran, Klumpit, Pulutan dilengkapi sarana olahraga dan track untuk lari atau jalan kaki juga taman untuk menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) tetapi tetap terpenuhi fungsi lapangan sepak bola sebagaimana keberadaannya untuk sarana olahraga yang pengembangannya dari lapangan sepak bola.
- Selanjutnya dimasa pandemi yang sedang meningkat saat ini, kita benar- benar harus bekerja ekstra keras dalam menanggulangi penyebaran Covid 19 khususnya bagi pemerintah kota untuk:
1. Dengan semakin banyaknya warga Salatiga yang terpapar Covid-19 dan harus isolasi mandiri di rumah karena berbagai kondisi yang ada, maka perlu segera dibuat sebuah kebijakan perbantuan kepada warga yang melakukan isolasi mandiri tersebut melalui dinas sosial atau dinas terkaitlainnya agar kebutuhannya terutama kebutuhan pokok hariannya terpenuhi.
 2. Pemerintah Kota berkolaborasi dan melibatkan komponen lain seperti swasta dan perguruan tinggi yang memiliki sumber daya yang potensial dalam mendukung langkah-langkah penanggulangan covid-19, mendisiplinkan protokol kesehatan secara ketat kepada masyarakat tanpa menghentikan roda perekonomian mereka.
 3. Memperbanyak sarana cuci tangan ditempat tempat publik dan sekaligusmemeliharanya karena beberapa titik ada yang airnya mati, sabunnya habis dll.

Sidang paripurna DPRD yang kami hormati

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Salatiga terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2020 yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian pandangan umum ini ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

➤ **Ibu Novia Praptiningsih, SH**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

Berkah dalem

Om swasti astu

Namo Budaya

Salam kebajikan

Rahayu

Srir Astu Swasti Prajabyah

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Salatiga.

Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kota Salatiga.

Yang kami hormati:

- Segenap Forkompinda dan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga.
- Sekretaris Daerah dan PLT Sekretaris DPRD Kota Salatiga.
- Staf Ahli Walikota Salatiga, Asisten Sekda, Kepala OPD di jajaran Pemerintah Kota Salatiga, serta para Camat, Lurah se Kota Salatiga.
- Para Direktur di lingkungan BUMD Kota Salatiga, para Rektor, tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia.
- Para Peserta yang mengikuti secara Daring

MERDEKA !!!

Rapat Paripurna Terhormat,

Pada Kesempatan ini Fraksi PDI Perjuangan akan menyampaikan berbagai masukan dalam mengkritisi laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020. Kita ketahui bersama bahwa laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota salatiga tahun Anggaran 2020 tetap merupakan progress report atau bersifat laporan namun saat ini sudah mengikuti sistem APBD yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Langsung, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga, yang kesemuanya substansinya tidak jauh berbeda dengan sistematika masa lalu berupa belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung dalam pelaksanaannya. Dalam Realisasi Pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2020 ada beberapa pos pendapatan, pos pembelanjaan yang mengalami kenaikan dan ada yang tidak mencapai target, Seperti Pendapatan Transfer Pemerintah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari DAU dan Dana Bagi Hasil Pajak serta Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi yang terdiri dari Pendapatan Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil lainnya. Terhadap hal tersebut Saudara Walikota untuk menjelaskan. Mengingat jika pendapatan tersebut pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan akan berdampak pada pembangunan di Salatiga. Demikian pula untuk realisasi dan pencapaian pendapatan asli daerah dan secara umum pendapatan daerah mengalami kenaikan. Tetapi nilai kenaikan tersebut belum signifikan karena target awal penetapan anggaran tidak dimaksimalkan dan tidak mendasari potensi yang sebenarnya.

Rapat Paripurna yang Terhormat

Ada beberapa catatan yang harus kita jadikan pegangan dalam memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan anggaran, mengapa demikian ? karena meskipun realisasi pelaksanaan anggaran boleh dibilang cukup bagus tetapi masih banyak temuan-temuan bahkan ada beberapa temuan dengan indikasi berat. Temuan dengan indikasi berat bahkan nyaris bisa menggagalkan perolehan penghargaan status daerah opini WTP, khususnya terutama temuan hasil pemeriksaan di RSUD Salatiga. Yang menurut BPK terjadi kerugian kurang lebih 1 Milyar dari yang berasal dari berbagai sektor sarana dan prasarana. Menurut Fraksi PDI Perjuangan temuan di RSUD harus jadi

pelajaran karena dalam merealisasi pelaksanaan pembangunan banyak pelanggaran seperti : tanpa dengan HPS, pembenahan admistrasi HPS, DPA, KAK, juga tanpa adanya surat jaminan pemeliharaan-pemeliharaan serta adanya keterlambatan penyelesaian pelaksanaan. Terhadap hal tersebut diatas diharapkan saudara walikota memberikan arahan khusus sehingga kedepan tidak terulang lagi, sebab meskipun anggaran tersebut menjadi otonomi penggunaan tetapi tidak boleh semau sendiri. Hal serupa juga realisasi pelaksanaan berbagai bantuan (Hibah) harus dilakukan penyempurnaan seperti data penerima system dan tehnik perolehan dana sebab terjadi kelemahan berbagai bantuan tersebut tanpa dibarengi dokumen-dokumen resmi seperti surat permohonan, rincian dalam proposal dan NPHD.

Rapat Paripurna Yang Terhormat,

Sebelum menutup pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan ikut merasa prihatin atas meningkatnya jumlah pasien terkonfirmasi positif covid-19, oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan mengajak semua pihak bersama masyarakat untuk tetap konsisten dengan protocol kesehatan 5 M sekaligus kami juga memberikan support kepada gugus tugas covid-19, Tenaga Kesehatan (Tim Medis), Gugus Tugas dari level RW sampai daerah. Demikian pula pada pemerintah yang segera berinisiasi untuk menghadapi adanya peningkatan Covid-19 sehingga seluruh OPD, SKPD, Camat, Lurah, Lembaga instansi Vertikal harus gotong royong untuk menekan wabah tersebut. Optimalkan penggunaan dan pemanfaatan dana rekofusing dengan dilakukan pengawasan dari semua pihak sehingga penggunaannya tepat sasaran.

Demikian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, semoga Tuhan Memberkati. Aom Santi-santi – santi Aom.

MERDEKA !!!!!

➤ **Bpk. Latif Nahari, ST**

Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati

Terima kasih kami sampaikan kepada masing-masing fraksi yang telah menyampaikan materi pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2020

Selanjutnya kepada Bapak Walikota yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Wali Kota Salatiga dipersilahkan untuk memberikan tanggapan dan atau sambutan terhadap Pandangan Umum Fraksi yang dimaksud.

➤ **Bpk. Muh Haris, SS**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian

Yang saya hormati Bapak ketua yang istirahat di rumah wakil ketua dan anggota DPRD

Bapak Walikota yang saya hormati, Bu Sekda, Para asisten, staf ahli serta hadirin sekalian yang berbahagia setelah kita mengikuti dan menyimak bersama pandangan umum fraksi-fraksi yang dimulai dari Demokrat Golkar, Gerindra, PKB, PKS dan terakhir fraksi PDIP maka saya akan sampaikan jawaban secara global atas apa yang Bapak dan Ibu sampaikan di depan.

Sedangkan untuk penjelasan secara detail yang bersifat lebih teknis akan dibahas dalam rapat- rapat komisi dengan Badan Anggaran DPRD beserta Tim

Anggaran Pemerintah Kota Salatiga dan Organisasi Perangkat Daerah yang lainnya

Bapak Ibu sekalian yang berbahagia terhadap masukan-masukan yang terkait dengan pendapatan daerah, pendapatan daerah akan terus kita laksanakan intensifikasi seperti saran dan arahan Bapak Ibu sekalian melalui aktifitas pendataan dan pengawasan dengan tetap menerapkan prinsip pemerintahan yang baik, clean dan good governance. Tentu juga kita tidak berharap biaya ekonomi tinggi dengan mengejar pendapatan tapi memberikan beban yang berat kepada rakyat. Hal itu juga tidak kita inginkan bersama-sama.

Yang kedua optimalisasi asset aset daerah tentu menjadi lebih berdaya, untuk lebih bisa dikaji apa perlu disewakan kepada pihak yang lain yang tentu hilirnya adalah meningkatnya pendapatan Kota Salatiga

Yang ketiga berusaha terus menjadikan BUMD kita yang sehat, BUMD yang betul-betul memberikan sumbangsih terhadap Pendapatan Asli Daerah kita.

Masukan-masukan yang lain insyaallah akan kami tindak lanjuti bersama dengan Bu Sekda dengan asisten, staf ahli dan OPD terkait menerima masukan-masukan dan saran-saran tentang Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 ini.

Yang Kedua masukan masukan tentang Belanja daerah memang seperti kita memahami sebagian harus kita berikan untuk penanganan covid 19, untuk jaring pengaman social, penanganan dampak-dampak yang lain pandemi yang sudah lebih dari satu setengah tahun di negara kita ini.

Yang kedua adanya SILPA yang mendapatkan perhatian dari Bapak Ibu sekalian sekali terhadap belanja daerah karena adanya pendapatan yang melebihi target dan efisiensi belanja Alhamdulillah secara umum target kinerja tetap dapat tercapai

Yang ketiga pemerintah daerah tentu selalu berusaha semaksimal mungkin melaksanakan pengendalian agar belanja daerah tepat guna tepat sasaran dan juga tepat manfaat

Bapak Ibu sekalian masukan-masukan yang lain yang Bapak Ibu sampaikan untuk temuan lkpd 2020 terdapat 13 temuan dan 12 rekomendasi dan sudah kami tindak lanjuti

Kemudian pada hari ini Jumat tanggal 25 Juni 2021 akan kita lakukan progres tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dengan BPK provinsi melalui Zoom meeting kemudian kita harapkan segera tuntas dan segera selesai

Ibu sekalian para pimpinan anggota DPR yang terhormat serta hadirin demikian beberapa hal yang kami sampaikan atas pandangan umum fraksi-fraksi Paripurna DPRD pada siang ini besar harapan saya jalinan komunikasi dapat terus kita pupuk dapat kita cari bersama-sama sehingga melaksanakan tugas kedua lembaga ini bisa berjalan dengan baik Sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Kota Salatiga sekali lagi matur nuwun terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

➤ **Bpk. Latif Nahari, ST**

Terima kasih kepada bapak wakil walikota yang telah memberikan tanggapan terkait dengan pandangan umum fraksi-fraksi yang sudah dilaksanakan tadi. Bapak ibu hadirin yang kami hormati demikianlah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD pada hari ini berjalan dengan lancar tertib dan aman selanjutnya akan tindaklanjuti dengan pembahasan bersama antara badan anggaran DPRD dengan tim anggaran Pemerintah Daerah Kota Salatiga untuk

mendapatkan persetujuan bersama menjadi peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Tidak lupa kita sampaikan dengan meningkatnya kasus covid-19 di Kota Salatiga Mari kita bersama-sama senantiasa menjaga diri , keluarga kita dan masyarakat kita agar tidak terpapar covid 19 dengan senantiasa menerapkan protokol kesehatan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kekuatan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian amin.

Akhirnya Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin rapat paripurna DPRD Kota Salatiga kami nyatakan selesai dan secara resmi kami tutup.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI, ST